

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 140/Pdt.G/2020/PN.Jap mengenai sengketa pertanahan adat, dengan fokus pada penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas tanah adat tanpa adanya Pelepasan Hak Adat (Verklaring van Afstand) yang sah. Permasalahan inti terletak pada benturan antara kewenangan administratif Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penerbitan sertifikat dan prinsip perlindungan hak ulayat yang dijamin dalam sistem hukum nasional serta rezim hukum khusus di Papua. Hasil kajian menunjukkan bahwa menurut hukum agraria nasional, yang diperkuat oleh Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, pelepasan hak adat merupakan syarat mutlak sebelum tanah ulayat dapat disertifikasi secara individual. Majelis hakim mengabulkan gugatan dan menyatakan tindakan Tergugat serta Turut Tergugat II (BPN) sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) karena mengabaikan alas hak adat yang lebih dahulu ada. Landasan normatif yang digunakan bersifat kumulatif, meliputi Pasal 1365 KUHPerdata, ketentuan UU Otsus Papua, serta peraturan pertanahan mengenai cacat administratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerbitan SHM tanpa pelepasan hak adat tidak hanya bertentangan dengan asas keadilan dan penghormatan hak masyarakat adat, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum lanjutan karena putusan perdata tidak serta merta berimplikasi pada pencabutan administratif sertifikat oleh BPN.

Kata Kunci: Hak Adat, Pelepasan Hak, Sertifikat Hak Milik, Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

*This research examines the Jayapura District Court Decision No. 140/Pdt.G/2020/PN.Jap concerning a dispute over customary land, focusing on the issuance of a Land Ownership Certificate (SHM) without a valid customary release (Verklaring van Afstand). The core issue lies in the tension between the administrative authority of the National Land Agency (BPN) to register land rights and the legal obligation to protect customary (adat) land rights under national agrarian law and the Papua Special Autonomy framework. The findings indicate that, under both national agrarian principles and Papua's special autonomy regulations, the release of customary rights is a mandatory prerequisite for individual land titling. The Panel of Judges granted the plaintiff's claim and declared the actions of the defendant and co-defendant (BPN) to constitute an unlawful act (*Onrechtmatige Daad*) for ignoring the plaintiff's prior valid right acquired under customary procedure. The legal reasoning rests cumulatively on Article 1365 of the Indonesian Civil Code, the Otsus Papua regime, and administrative provisions on defective land titling. The study concludes that issuing a certificate without prior release of customary rights violates the principle of social justice and legal certainty. Although the SHM was held non-binding in civil terms, the absence of an explicit administrative revocation order leaves a residual gap in legal certainty at the administrative level..*

Keywords: Customary Rights, Rights of Release, Certificates of Ownership, Unlawful Acts, Court Decisions.